



LEMBAGA
AKREDITASI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN


LAM TEKNIK


Lampiran 14 Peraturan LAM Teknik Nomor 6 Tahun 2025
Matriks Penilaian Program Diploma Dua Perpanjangan

MATRIKS PENILAIAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI

Diploma Dua Perpanjangan

2025

 Graha ReKayasa Indonesia, Lantai 6 Jl. Halimun Raya No.39,
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan– 12980

 0857-8381-0387

 <https://lamteknik.or.id>

No	Kriteria	Indikator	4	3	2	1	0
A. KRITERIA							
I. Diferensiasi Misi (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi)							
Visi, Misi Tujuan dan Sasaran (Indikator Kinerja Utama)							
1	Kekhasan VMTS	Pernyataan VMTS yang unik dan spesifik sebagai identitas PT, UPPS, dan visi keilmuan program studi sebagai keunggulan kompetitif yang didukung dengan renstra dan kurikulum yang memadai. Tabel 1 LKPS.	VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi dengan mempertimbangkan: (1) Linearitas visi PT yang diturunkan ke VMTS UPPS sebagai identitas UPPS; (2) Kesesuaian VMTS UPPS dengan renstra; (3) Kesesuaian visi keilmuan program studi dengan kurikulum; (4) Tinjau ulang VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi secara periodik.	VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi dengan mempertimbangkan: (1) Linearitas visi PT yang diturunkan ke VMTS UPPS sebagai identitas UPPS; (2) Kesesuaian VMTS UPPS dengan renstra; (3) Kesesuaian visi keilmuan program studi dengan kurikulum.	VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi dengan mempertimbangkan: (1) Linearitas visi PT yang diturunkan ke VMTS UPPS sebagai identitas UPPS; (2) Kesesuaian VMTS UPPS dengan renstra.	Tidak ada skor kurang dari 2.	
2	Mekanisme penyusunan VMTS	Mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS dan tujuan utama yang ingin dicapai dalam penyusunan visi keilmuan program studi dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS dengan mempertimbangkan aspek: (1) Keterlibatan pemangku kepentingan internal yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; (2) Pemangku kepentingan eksternal yang terdiri dari lulusan, pengguna lulusan, dan pakar.	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS dengan mempertimbangkan aspek: (1) Keterlibatan pemangku kepentingan internal yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; (2) Pemangku kepentingan eksternal yang terdiri dari lulusan dan pengguna lulusan.	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS dengan mempertimbangkan aspek: (1) Keterlibatan pemangku kepentingan internal yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; (2) Pemangku kepentingan eksternal yang terdiri dari lulusan.	Mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS dengan mempertimbangkan aspek: (1) Keterlibatan pemangku kepentingan internal yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan; (2) Tidak melibatkan pemangku kepentingan eksternal.	Tidak ada skor kurang dari 1.
II. Akuntabilitas							

No	Kriteria	Indikator	4	3	2	1	0
Tata Pamong dan Tata Kelola (Indikator Kinerja Utama)							
3	Sistem tata pamong Skor = (I + II) / 2	I. Kelengkapan struktur organisasi dan kebijakan operasional yang berpedoman pada statuta Perguruan Tinggi yang digunakan.	Sistem tata pamong UPPS yang mencakup: (1) Tersedianya statuta Perguruan Tinggi yang mengatur struktur organisasi dan kebijakan operasional; (2) Tersedianya kewenangan dan tugas yang dijalankan secara efektif; (3) Bukti sah pelaksanaan struktur organisasi dan kebijakan operasional; (4) aras kewenangan organ pokok dijalankan secara efektif untuk mendukung perkembangan jangka panjang.	Sistem tata pamong UPPS yang mencakup: (1) Tersedianya statuta Perguruan Tinggi yang mengatur struktur organisasi dan kebijakan operasional; (2) Tersedianya kewenangan dan tugas yang dijalankan secara efektif; (3) Bukti sah pelaksanaan struktur organisasi dan kebijakan operasional.	Sistem tata pamong UPPS yang mencakup: (1) Tersedianya statuta Perguruan Tinggi yang mengatur struktur organisasi dan kebijakan operasional; (2) Tersedianya kewenangan dan tugas yang dijalankan secara efektif.	Sistem tata pamong UPPS yang mencakup: (1) Tersedianya statuta Perguruan Tinggi yang mengatur struktur organisasi dan kebijakan operasional; (2) Tersedianya kewenangan dan tugas namun belum dijalankan secara efektif.	Tidak ada skor kurang dari 1.
	Komitmen pimpinan dan kemampuan manajerial	II. Pimpinan UPPS memiliki komitmen pada: (1) Visi dan tujuan organisasi; (2) Integritas dan transparansi; (3) Pengembangan sumber daya.	Pimpinan UPPS memiliki komitmen pada butir (1), (2), dan (3).	Pimpinan UPPS memiliki komitmen pada butir (1) dan (2) atau (1) dan (3).	Pimpinan UPPS memiliki komitmen pada butir (1).	Pimpinan UPPS tidak memiliki komitmen.	Tidak ada skor kurang dari 1.
III. Relevansi Pendidikan dan PKM							

No	Kriteria	Indikator	4	3	2	1	0
3.1. Pendidikan							
4	Pemutakhiran kurikulum	Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu namun belum menunjukkan perkembangan ipteks.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun namun tidak melibatkan pemangku kepentingan
5	Profil lulusan dan CPL. Skor = (I + II) / 2	I. Profil lulusan yang ditetapkan oleh Program Studi.	Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, kebutuhan pengguna, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal, nasional, dan global.	Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, kebutuhan pengguna, sumber daya yang dimiliki, serta kepentingan lokal atau nasional. Tabel 3.a.1. LKPS.	Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, kebutuhan pengguna, serta sumber daya yang dimiliki.	Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi, serta kebutuhan pengguna.	Program Studi menetapkan profil lulusan dengan mempertimbangkan visi UPPS dan visi keilmuan program studi.
		II. Kesesuaian Profil lulusan dengan capaian pembelajaran (CPL)	CPL diturunkan dari profil lulusan yang mencakup: (1) Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna; (2) Mengikuti perkembangan ipteks dan industri; (3) Memiliki kompetensi dalam menghadapi persaingan global;	CPL diturunkan dari profil lulusan yang mencakup: (1) Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna; (2) Mengikuti perkembangan ipteks dan industri; (3) Memiliki kompetensi dalam	CPL diturunkan dari profil lulusan yang mencakup: (1) Kesesuaian dengan kebutuhan pengguna; (2) Mengikuti perkembangan ipteks dan industri.	CPL diturunkan dari profil lulusan hanya mencakup kesesuaian dengan kebutuhan pengguna	Tidak ada skor kurang dari 1.

No	Kriteria	Indikator	4	3	2	1	0
			(4) Dilakukan pengukuran CPL.	menghadapi persaingan global.			
6	Rencana Proses Pembelajaran (RPS) Skor = $(I + (2 \times II)) / 3$	I. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen RPS yang terdiri dari: 1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada capaian pembelajaran mata kuliah; 3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5. Metode pembelajaran; 6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan	Dokumen RPS mencakup sembilan (9) komponen yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten.	Dokumen RPS mencakup sembilan (9) komponen yang dapat diakses oleh mahasiswa.	Dokumen RPS mencakup sembilan (9) komponen yang tidak dapat diakses oleh mahasiswa.	Kelengkapan RPS dan komponen belum terpenuhi.	Tidak ada RPS.

No	Kriteria	Indikator	4	3	2	1	0
		dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9. Daftar referensi yang digunakan. Tabel 3.a.1. LKPS.					
		II. Proses tinjauan rutin RPS.	Proses tinjauan rutin terhadap RPS dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi, kesesuaian dengan CPL dan perkembangan keilmuan terbaru yang mencakup: (1) Analisis CPL; (2) Evaluasi kesesuaian materi dan metode pembelajaran; (3) Peninjauan metode penilaian; (4) Penyesuaian kurikulum dan pembaruan materi.	Proses tinjauan rutin terhadap RPS dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi, kesesuaian dengan CPL dan perkembangan keilmuan terbaru yang mencakup: (1) Analisis CPL; (2) Evaluasi kesesuaian materi dan metode pembelajaran; (3) Peninjauan metode penilaian.	Proses tinjauan rutin terhadap RPS dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi, kesesuaian dengan CPL dan perkembangan keilmuan terbaru yang mencakup: (1) Analisis CPL; (2) Evaluasi kesesuaian materi dan metode pembelajaran.	Proses tinjauan rutin terhadap RPS dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi, kesesuaian dengan CPL dan perkembangan keilmuan terbaru yang hanya mencakup analisis CPL.	Tidak dilakukan proses tinjauan rutin terhadap RPS secara berkala.
7	Proses Pembelajaran Skor = (I + II) / 2	I. Proses pembelajaran untuk memastikan efektivitas, kualitas, dan keberhasilan pencapaian CPL.	Proses pembelajaran yang efektif dalam mencapai CPL dengan mempertimbangkan: (1) Metode pembelajaran; (2) Media dan sumber belajar; (3) Interaksi dosen	Proses pembelajaran yang efektif dalam mencapai CPL dengan mempertimbangkan: (1) Metode pembelajaran; (2) Media dan sumber belajar;	Proses pembelajaran yang efektif dalam mencapai CPL dengan mempertimbangkan: (1) Metode pembelajaran;	Proses pembelajaran yang efektif dalam mencapai CPL yang hanya mempertimbangkan metode pembelajaran.	Tidak ada skor kurang dari 1.

No	Kriteria	Indikator	4	3	2	1	0
			dan mahasiswa; dan (4) Peningkatan daya analisis kritis.	(3) Interaksi dosen dan mahasiswa.	(2) Media dan sumber belajar.		
		II. Tinjauan rutin proses pembelajaran.	Terdapat bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan RPS. Pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran mencakup: (1) Peninjauan kesesuaian dengan RPS; (2) Evaluasi metode pembelajaran; (3) Identifikasi peluang perbaikan; dan (4) Tindakan perbaikan	Terdapat bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan RPS. Pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran mencakup: (1) Peninjauan kesesuaian dengan RPS; (2) Evaluasi metode pembelajaran; dan (3) Identifikasi peluang perbaikan.	Terdapat bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan RPS. Pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran mencakup: (1) Peninjauan kesesuaian dengan RPS; dan (2) Evaluasi metode pembelajaran.	Terdapat bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan RPS. Pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran hanya dilakukan dengan peninjauan kesesuaian dengan RPS.	Belum ada bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan RPS.
3.2. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)							
8	PkM	Persentase kegiatan PkM DTPS yang sesuai dengan peta jalan PkM yang mendukung VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi (PPkM)	Jika PPkM \geq 25%, maka Skor = 4	Jika PPkM < 25% , maka Skor = 2 + (8 x PPkM)		Tidak ada skor kurang dari 2	
IV. Sumber Daya Manusia							
9	Profil Dosen	Kecukupan dosen <i>homebase</i> (DHB) Tabel 4 LKPS	DHB \geq 5	Tidak ada skor 1 s.d. 3			DHB < 5

No	Kriteria	Indikator	4	3	2	1	0
10		Dosen pembagi rasio untuk disesuaikan sebagai DTSP. Tabel 4 LKPS	Jika NDTPS ≥ 6 dan PDTT $\leq 10\%$, Maka Skor = 4	Jika $3 \leq \text{NDTPS} < 6$ dan PDTT $\leq 40\%$, maka Skor = 2 + 2 (A x B) jika NDTPS ≥ 6 dan $10\% < \text{PDTT} \leq 40\%$, Maka Skor = 2 + (2 x B)		Jika NDTPS ≥ 3 dan PDTT $> 40\%$, Maka skor = 1	Tidak ada skor dibawah 1.
			NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. $\text{PDTT} = (\text{NDTT} / (\text{NDT} + \text{NDTT})) \times 100\%$ $A = ((\text{NDTPS} - 3)/3)$. $B = (40\% - \text{PDTT})/40\%$, Jika PDTT $\leq 40\%$. $B = (40\% - \text{PDTT})/30\%$, Jika $10\% < \text{PDTT} \leq 40\%$.				
11		Kualifikasi akademik DTSP. Tabel 4 LKPS.	Jika NDS3 ≥ 1 , maka Skor = 4	Tidak ada skor sama dengan 3.	Jika NDS3 < 1 DTSP , maka Skor = 2.	Tidak ada skor kurang dari 2	
			NDS3 = Jumlah DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan.				
12		Jabatan akademik DTSP. Tabel 4 LKPS.	Jika PGBLKL $\geq 30\%$, maka Skor = 4	Jika PGBLKL $< 30\%$, maka Skor = 2 + ((20 x PGBLKL) /3)	Tidak ada skor kurang dari 2		
			NDGB = Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTSP yang memiliki jabatan akademik Lektor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. $\text{PGBLKL} = ((\text{NDGB} + \text{NDLK} + \text{NDL}) / \text{NDTPS}) \times 100\%$.				

No	Kriteria	Indikator	4	3	2	1	0
V. Sarana dan Prasarana							
13	Sarana dan Prasarana	<p>Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik yang meliputi:</p> <p>(1) Ketersediaan media pembelajaran, perangkat elektronik, alat praktik laboratorium;</p> <p>(2) Ketersediaan ruang kelas, laboratorium sesuai dengan panduan asosiasi penyelenggara program studi, dan perpustakaan;</p> <p>(3) Kelayakan sarana dan prasarana;</p> <p>(4) Kemudahan akses sarana prasarana.</p> <p>Tabel 5 LKPS</p>	Memenuhi empat unsur kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan akademik.	Memenuhi unsur 1,2 dan 3 kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan akademik.	Memenuhi unsur 1 dan 2 kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan akademik.	Hanya memenuhi unsur 1 kecukupan dan mutu sarana prasarana kegiatan akademik.	Tidak ada skor kurang dari 1.
VI. Mahasiswa							
14	Masa studi	<p>Masa studi. MS = Rerata masa studi lulusan (tahun).</p> <p>Tabel 6.a dan 6.b LKPS.</p>	Jika $2,0 < MS \leq 2,5$, maka Skor = 4	Jika $2,5 < MS \leq 4$, maka Skor = $9 - (2 \times MS)$.			Jika $MS \leq 1,5$ maka Skor = 0
15	Persentase lulusan tepat waktu	<p>Persentase kelulusan tepat waktu (PTW)</p> <p>Rumus perhitungan: $PTW = ((b/a) \times$</p>	Jika $PTW \geq 80\%$, maka skor = 4.	Jika $PTW < 80\%$, maka Skor = $1 + ((30 \times PTW) / 8)$			Tidak ada skor kurang dari 1

No	Kriteria	Indikator	4	3	2	1	0
		100%) Tabel 6.a dan 6.b LKPS.					
VII. Sistem Penjaminan Mutu							
16	Keberadaan unit penjaminan mutu dan komitmen pimpinan Skor = (I + II) / 2	I. Keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) dokumen legal bahwa auditor bersifat independen; (3) Dokumen pelaksanaan audit mutu internal; (4)Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	UPPS memiliki aspek nomor 1 sampai dengan nomor 4.	UPPS memiliki aspek nomor 1 sampai dengan nomor 3.	UPPS memiliki aspek nomor 1 dan aspek nomor 2.	UPPS memiliki aspek nomor 1.	UPPS tidak memiliki dokumen.
	Ketersediaan perangkat SPMI dan pengakuan mutu eksternal	II. Ketersediaan perangkat SPMI yang minimal mencakup: 1. Kebijakan SPMI; 2. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4. Tata cara pendokumentasian	UPPS memiliki perangkat SPMI yang minimal mencakup: 1. Kebijakan SPMI; 2. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4. Tata cara pendokumentasian yang lengkap dan	UPPS memiliki perangkat SPMI yang minimal mencakup: 1. Kebijakan SPMI; 2. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4. Tata cara pendokumentasian	UUPPS memiliki perangkat SPMI yang minimal mencakup: 1. Kebijakan SPMI; 2. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi;	UPPS belum memiliki perangkat SPMI yang minimal mencakup: 1. Kebijakan SPMI; 2. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4. Tata cara	Tidak ada skor kurang dari 1.

No	Kriteria	Indikator	4	3	2	1	0
		implementasi SPMI, serta sistem penjaminan mutu memiliki pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi. Tabel 7.a. LKPS.	dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu internasional.	implementasi SPMI yang lengkap dan dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu nasional.	dan 4. Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI yang lengkap dan belum dikembangkan secara berkelanjutan serta memiliki pengakuan mutu nasional.	pendokumentasian implementasi SPMI.	
17	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	IKT disusun sesuai dengan unsur : (1) tujuan strategis organisasi; (2) memberikan dampak positif dan terukur; (3) menunjukkan daya saing internasional; (4) telah diukur dan dianalisis untuk perbaikan UPPS dan Program studi.	Memenuhi unsur 1,2,3 dan 4 IKT.	Memenuhi unsur 1,2 dan 3 IKT.	Memenuhi unsur 1 dan 2 IKT.	Hanya memenuhi unsur 1 IKT.	Tidak ada skor kurang dari 1.

No	Kriteria	Indikator	4	3	2	1	0
18	Keterlaksanaan Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: (1) Tersedianya dokumen IKU dan IKT Pendidikan, Penelitian dan PkM; (2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (3) Bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (4) Tersedianya bukti peningkatan standar. Tabel 7.b. LKPS.	UPPS dan PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 4 aspek.	UPPS dan PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.	UPPS dan PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 2.	UPPS dan PS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1.	Tidak ada skor kurang dari 1.